

**BAB III**  
**PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NEGARA BAGIAN AUSTRALIA**  
**TERKAIT PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (1992-2009)**

Bab III merupakan pembahasan mengenai kebijakan Negara Bagian Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab seperti profil Negara Bagian Australia dan bentuk penanganan disabilitas di setiap negara bagian, kemudian menjelaskan mengenai landasan hukum disabilitas yang dimiliki Australia. Dan membahas mengenai DDA 1992 yang menjadi titik balik dan landasan utama dalam perkembangan kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas Australia, baik dalam tingkat Pemerintah Federal dan Negara Bagian Australia dalam jangka waktu 1992-2009. Pada tahap ini, proses penanganan terkait disabilitas cenderung lebih banyak berkembang dalam ranah otoritas negara bagian Australia. Spesifikasi operasional pemenuhan terhadap kebutuhan dan hak disabilitas sedikit banyak dilakukan oleh Pemerintah Negara Bagian Australia, keadaan ini kemudian memunculkan tuntutan untuk terjadinya kolaborasi yang lebih komprehensif antara semua tingkatan Pemerintah Australia untuk bersama memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas di Australia.

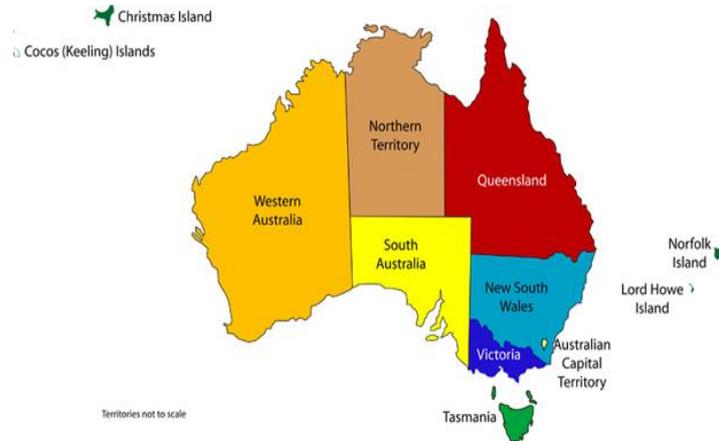
**A. Profil Negara Bagian Australia**

Australia menjadi negara dengan bentuk pemerintahan federal setelah menjadi suatu bangsa pada tahun 1901. *Commonwealth Constitutions of Australia*, yang mendasari sistem tersebut membentuk Pemerintahan Australia ke dalam tiga tingkatan. Pertama, Pemerintah Federal (pemerintah nasional atau pemerintah persemakmuran). Kedua, pemerintah negara bagian serta daerah istimewa (*special territory*), dan ketiga pemerintah lokal. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki yurisdiksi kekuasaan masing-masing. Parlemen dan Pemerintah Nasional Australia berhubungan dengan masalah-masalah kepentingan nasional (Hamid, 1999). Sedangkan negara bagian dan teritori serta badan-badan legislatifnya komplemen aktivitas pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah lokal melakukan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sesuai dengan Konstitusi Australia (Konstitusi Persemakmuran), terdapat satu Pemerintahan Nasional (Federal), enam Pemerintah Negara Bagian (State) dan dua teritori. Dengan keseluruhan membawahi sekitar 900 pemerintahan lokal. Ke enam

negara bagian memiliki perangkat pemerintahan dan badan legislatif tersendiri. Berikut ini terdapat peta terkait negara-negara bagian dan teritori Australia.

**Gambar 3.1 Peta Australia**



Sumber : (Australia F. , 2016)

### 1. *Western Australia*

*Western Australia* terkenal sebagai negara bagian terbesar di Australia, dengan ibukota negara bagian adalah Perth. Luas wilayah mencapai 2.529.875 km<sup>2</sup> dan menyumbang 33 % dari total daratan Australia. Dengan luas pantai dan daratan mencapai 12.889 km<sup>2</sup>, Australia Barat memiliki garis pantai terpanjang dari semua negara bagian dan teritori Australia (DFAT, 2010).

Dalam perkembangannya, *Western Australia* menjadi salah satu negara bagian yang mengalami perkembangan yang paling signifikan terkait dengan penanganan terhadap disabilitas di Australia. Pada awalnya penanganan dan layanan terhadap disabilitas bersifat institusional, dengan menempatkan para penyandang disabilitas secara umum kedalam lembaga rehabilitasi menjadi sistem utama yang digunakan oleh Australia (negara bagian dan teritori). Akantetapi, pada akhir tahun 1980an perkembangan reformasi terkait penanganan layanan terhadap disabilitas di Australia berlangsung dinamis. Politik deinstitutionalisasi dan pengenalan filosofi layanan berbasis masyarakat baru, dan berfokus pada pengguna atau individu disabilitas menjadi teknis baru yang menjadi acuan Australia dalam kebijakan terkait penanganan dan pelayanan penyandang disabilitas. *Western Australia* menjadi negara bagian yang menerapkan kebijakan tersebut dan mengalami kemajuan

yang pesat dalam proses reformasi deinstusionalisasi terkait pelayanan disabilitas (Lisa Bostock, 2004).

## 2. *Victoria*

*Victoria* adalah negara bagian terpadat kedua di Australia, ibukota negara bagiannya ialah *Melbourne*. *Victoria* memiliki total area 227,416 km<sup>2</sup> dan menyumbang 3 persen dari total daratan Australia, dan menjadi negara bagian dengan daratan terkecil. Garis pantai *Victoria* adalah 1800 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan Selat Bass, badan air yang memisahkan daratan dari *Tasmania* (DFAT, 2010).

Sama halnya dengan *Western Australia*, *Victoria* menjadi negara bagian dengan perkembangan yang maju terkait penanganan dan pelayanan terkait disabilitas. dalam proses penerapan kebijakan terkait deinstusionalisasi dan reformasi pelayanan disabilitas, *Victoria* menjadi negara bagian yang mengalami kemajuan yang pesat bersama dengan *Western Australia*.

### 1. *Tasmania*

*Tasmania* terkenal sebagai negara bagian yang memiliki populasi terkecil ke-3 di Australia setelah *Australia Capital Territory* dan *Northern Territory*. Ibu kota negara bagiannya adalah *Hobart*. Luas wilayah *Tasmania* adalah 68.401 km<sup>2</sup>, menjadikannya negara bagian terkecil di *Australia*. Area ini hanya menyumbang 0,9 persen dari total area Australia (DFAT, 2010).

Dalam perkembangan terkait penanganan dan pelayanan disabilitas di *Tasmania* berjalan lambat, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial masyarakat *Tasmania* yang mayoritas hidup dalam keadaan miskin (*low income*). Disamping itu, *stereotype* mengenai disabilitas sebagai sebuah kutukan dan beban masih berkembang dikalangan Masyarakat *Tasmania*, serta ketersediaan fasilitas dan tingkat aksesibilitas peralatan fisik (*physical environment*) yang belum memadai pada saat itu. Lebih lanjut, koordinasi antar pemerintah nasional, negara bagian dan organisasi disabilitas sekitar ikut mempengaruhi perkembangan terkait penanganan dan pelayanan disabilitas di *Tasmania*.

Pada tahun 2005, Pemerintah *Tasmania* mengeluarkan kebijakan *the Disability Framework for Action 2005-2008*. Kebijakan ini menguraikan mengenai kerangka terkait partisipasi penuh penyandang disabilitas diseluruh negara, badan pemerintah dan negara bagian. Pemerintah *Tasmania* berusaha

memperkenalkan agenda reformasi sistem komprehensif terkait disabilitas terhadap Masyarakat *Tasmania* (Hinton, 2006). Akan tetapi, kurangnya pemahaman dan sikap apatis terhadap kebijakan ini menghambat perkembangan terkait penanganan dan pelayanan disabilitas di *Tasmania*.

### 2. *South Australia*

*South Australia* merupakan salah satu negara bagian Australia, dengan ibukotanya yang bernama *Adelaide*. *South Australia* memiliki luas 983.482 km<sup>2</sup> dan menyumbang 12,7 persen Australia (DFAT, 2010).

Dalam perkembangannya *South Australia* terkait kebijakan reformasi deinstitutional berjalan lambat dibanding dengan *Western Australia* dan *Victoria*. Laju reformasi sosial di *South Australia* dicirikan oleh siklus sosial pemerintahan yang tidak teratur, inisiatif untuk terjadinya perubahan dan peningkatan terkait pelayanan disabilitas tidak banyak berkembang dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2002, Pemerintah *South Australia* mengeluarkan kebijakan terkait inklusi sosial untuk menangani permasalahan terkait tunawisma, disabilitas dan sebagiannya (Lou Wilson, 2015). Akan tetapi, pada pelaksanaannya kebijakan ini menyebabkan kepanikan moral yang diprakarsai oleh media dan secara tidak langsung mengakibatkan ketidakstabilan di *South Australia*.

### 3. *Queensland*

*Queensland* adalah salah satu negara bagian terpadat di Australia, ibukota negara bagiannya ialah *Brisbane*. *Queensland* merupakan negara bagian terbesar kedua Australia (setelah *Western Australia*) dengan luas wilayah 1.730.648 km<sup>2</sup>. *Queensland* juga memiliki perbatasan terpanjang kedua di Australia (di belakang *New South Wales*) dengan total panjang 3339 km<sup>2</sup> (DFAT, 2010).

Pergembangan terkait penanganan dan pelayanan disabilitas di *Queensland* dapat dikatakan cukup berkembang. Inisiatif terkait peningkatan dalam pelayanan disabilitas telah banyak dikembangkan, terjadi peningkatan dalam proses pelayanan kemanusiaan dan menerapkan proses pelayanan yang merujuk pada sistem *community-based disability* (Kulpers P, 2003). Pemerintah negara bagian *Queensland* bekerjasama dengan organisasi dan lembaga yang bergerak dibidang disabilitas. Peran organisasi dan lembaga

disabilitas dalam proses penerapan *community-based* sangat signifikan dalam proses pelayanan dan advokasi disabilitas terhadap masyarakat sekitar.

#### 4. *New South Wales*

*New South Wales* merupakan salah satu negara bagian Australia dengan ibukota negara bagiannya yaitu *Sydney*. *New South Wales* terletak di Australia tenggara. Dan memiliki total luas 800.642 km<sup>2</sup> dan mencakup 10,4 persen Australia (DFAT, 2010).

Pelayanan dan penanganan disabilitas di *New South Wales* berkembang cukup pesat. Inisiatif terkait perbaikan dalam bentuk layanan terkait disabilitas terus dilakukan. Pada tahun 2006, Pemerintah *New South Wales* memperkenalkan strategi disabilitas 10 tahun, dikenal sebagai *Stronger Together: A New Direction for Disability Services for NSW: 2006–2016* (Angela Dew, 2014). Kebijakan ini menjadi tanggung jawab *Department of Family and Community Services* yang terletak di *Sydney*. Kebijakan yang dikembangkan di tingkat pusat dilaksanakan di seluruh NSW melalui layanan yang disampaikan di tingkat regional.

##### 1. *Northern Territory*

*Northern Territory*/Wilayah Utara merupakan suatu teritori Australia dengan ibukotanya yang bernama *Darwin*. *Northern Territory* memiliki luas total 1.349.129 km<sup>2</sup>, dan menyumbang sekitar 17,5 persen dari total daratan Australia. Ujung atas *Northern Territory* memiliki garis pantai yang memanjang lebih dari 13.500 km<sup>2</sup> (DFAT, 2010).

*Northern Territory* memiliki jumlah penduduk aborigin (*Aboriginal and Torres Strait Islander people*) lebih banyak dibanding negara bagian lainnya. Penanganan dan pelayanan disabilitas tidak banyak berkembang di *Northern Territory*. Secara administratif penanganan disabilitas tidak berkembang di wilayah ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia profesional untuk membantu proses pelayanan disabilitas menjadi faktor yang signifikan. Disamping itu, menurut laporan *the National Committee of Inquiry into Compensation and Rehabilitation in Australia* menyatakan faktor tingkat kemiskinan berhubungan dengan hal tersebut. Dan merekomendasikan tersedianya *handicap* terkait prinsip kesetaraan antara penyandang disabilitas di *Northern Australia* (Webber, 1990). Sehingga dalam proses rehabilitasi dan pelayanan sosial dapat dilakukan dengan maksimal.

## 2. *Australia Capital Territory*

*Australia Capital Territory*/Wilayah Ibu Kota Australia juga dikenal memiliki populasi terkecil kedua di Australia setelah *Northern Territory*. Ibu kota negara bagian ini adalah *Canberra*, yang juga menjadi ibu kota Australia. *Australia Capital Territory* memiliki luas total hanya 2.358 km<sup>2</sup> yang menyumbang kurang dari satu persen dari total daratan Australia. Sebagai wilayah ibu kota dari *Australia*, *Australia Capital Territory* mengalami perkembangan yang pesat terkait pelayanan dan penanganan terkait disabilitas.

Berbagai negara bagian dan teritori memiliki tingkat perkembangan dan kebijakannya masing-masing terkait penanganan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Inisiatif untuk adanya koordinasi tingkat nasional antar pemerintah pusat, negara bagian, organisasi dan penyandang disabilitas yang lebih komprehensif dan koordinatif menjadi hal yang perlu untuk ditindak lanjuti untuk meminimalisir kesenjangan perkembangan terkait penanganan disabilitas diantara negara bagian dan teritori.

### **B. Landasan Hukum Disabilitas Australia**

Tahun 1981 menjadi tahun bersejarah bagi disabilitas internasional, dan menjadi titik penting dalam perkembangan perlindungan basis hukum bagi penyandang disabilitas dunia (Mason, 2002). Hal ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan landasan hukum disabilitas di Australia. Hal ini dibuktikan dengan diadopsi secara resmi basis hukum pelayanan dan anti-diskriminasi terhadap disabilitas oleh Pemerintah Australia yaitu *Disability Services Act* dan *Disability Discrimination Act*.

Pada awal tahun 1980an, undang-undang terkait anti-diskriminasi telah banyak berkembang di kawasan Negara Bagian Australia (*provincial or regional governments*). Mayoritas Negara Bagian Australia yang telah memiliki landasan hukum terkait anti-diskriminasi. Seperti *Western Australia* dengan *Equal Opportunity Act 1984*, *South Australian* dengan *Equal Opportunity Act 1984* serta *New South Wales* dengan *Anti-Discrimination Act 1977*. Lebih lanjut, pada saat itu landasan hukum anti-diskriminasi yang paling banyak berkembang terkait dengan alasan-alasan seperti ras dan diskriminasi seks. Kemudian setelah isu mengenai anti-diskriminasi terhadap disabilitas mulai menjadi perhatian dunia dan Australia mengadopsi DDA (*Disability Discrimination Act*), Negara Bagian Australia menambah kategori

cakupan Undang-Undang Anti-Diskriminasi dengan menambahkan penanganan terkait disabilitas kedalam undang-undangnya.

Lebih lanjut, perkembangan terkait landasan hukum disabilitas juga terlihat dalam Undang-Undang Komisi Kemanusiaan Australia (*Human Rights Commission Act*). Dan menjadi dasar utama untuk dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia Nasional pertama kali dalam sejarah Australia. Undang-undang ini mendefinisikan yurisdiksi komisi baru dengan mengacu pada sejumlah instrumen internasional dan termasuk didalamnya Deklarasi Hak Penyandang Disabilitas (*the Declaration on the Rights of Disabled Person*) dan Deklarasi Tentang Hak orang-orang yang terbelakang secara mental (*the Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons*). Pada tahap ini, isu terkait disabilitas telah benar-benar menjadi *concern* utama Pemerintah Australia.

Deklarasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang melekat pada diri mereka untuk dihormati sebagai seseorang manusia yang bermartabat. Deklarasi ini memberikan landasan hukum terkait akses hak, untuk kemudian memperoleh hak asasi manusia yang fundamental dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari negara seperti ; hak atas hidup yang layak dan normal, hak atas perlindungan hukum terhadap pelecehan atau pembatasan apapun atas hak mereka, hak atas setiap perawatan, rehabilitasi, pendidikan, pelatihan dan layanan lain yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka semaksimal mungkin, hak atas keamanan ekonomi dan sosial, hak atas pekerjaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial dan sebagiannya (OHCHR, 2000).

Selanjutnya, beberapa poin deklarasi internasional tentang disabilitas diberi bentuk hukum yang lebih pasti dalam Undang-Undang Layanan Disabilitas (*Disability Services Act*) yang disahkan oleh Pemerintah Federal dan negara bagian pada tahun 1980an. Undang-Undang ini menetapkan standar untuk bagaimana layanan khusus untuk penyandang disabilitas harus beroperasi, termasuk ketentuan untuk menangani keluhan pelecehan dan partisipasi dalam bagaimana layanan beroperasi.

*Disability Services Act* dan *Disability Discrimination Act* menjadi kedua landasan hukum utama yang dimiliki dan kemudian di implementasikan oleh Pemerintah Australia, negara bagian dan teritori dalam menyusun kebijakan terkait pemenuhan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

### C. Disability Discrimination Act 1992

*The Disability Discrimination Act 1992 (DDA)* adalah suatu undang-undang (*act*) yang disahkan oleh Parlemen Australia dengan tujuan utama untuk mengurangi segala tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi merujuk pada tindakan pengecualian yang dilakukan karena perbedaan atau ketidakmampuan baik dalam kondisi fisik maupun psikis. Selain itu, DDA jugamempromosikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang-bidang tertentu seperti perumahan, pendidikan, sosial, ekonomi dan penyediaan barang dan jasa. Secara spesifik, dalam hukum Australia DDA ini menetapkan standar untuk bagaimana layanan khusus terhadap penyandang disabilitas harus beroperasi. Termasuk didalamnya mengenai ketentuan untuk menangani keluhan pelecehan dan bentuk partisipasi dalam lingkungan kemasyarakatan.

Lebih lanjut, *Australian Human Rights Commision* menjelaskan mengenai mengenai dua tipe dari diskriminasi yaitu *direct discrimination* dan *indirect discrimination*. *Direct discrimination* merujuk pada keadaan ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan kurang baik daripada orang atau kelompok lain, dikarenakan latar belakang mereka atau karakteristik pribadi tertentu termasuk didalamnya karena alasan disabilitas. Kemudian, *indirect discrimination* terjadi ketika ada aturan atau kebijakan yang tidak masuk akal yang sama untuk semua orang, tetapi memiliki efek yang tidak adil pada orang-orang yang memiliki atribut tertentu (AHRC, 2012). Segala bentuk dan tindakan diskriminasi seharusnya tidak boleh dilakukan, selain itu tindakan ini dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum di bawah Undang-Undang Anti-Diskriminasi Federal.

Pada saat itu permasalahan terkait tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menjadi isu yang sangat meresahkan. Tindakan diskriminasi dapat dengan mudah ditemukan dalam keseharian masyarakat Australia seperti yang di alami oleh Scarlett Finney (AHRC, 2018). Pada tahun 1997, Scarlett yang berumur 5 tahun berusaha untuk mendaftar untuk masuk sekolah dasar. Akantetapi, pihak sekolah menolak pendaftarannya karena disabilitas yang dimilikinya yaitu spina bifida atau kelainan pada struktur tulang belakangnya. Pihak sekolah mengklaim bahwa Scarlett tidak akan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan sekolah tidak akan bisa menampungnya. Kasus penolakan ini menjadi perhatian masyarakat Australia,

pasalnya alasan dan tindakan diskriminasi yang dilakukan sangat tidak bisa diterima terutama oleh orangtua Scarlett. Orangtua siswa tersebut melakukan pengaduan terhadap *Human Rights and Equal Opportunity*, dengan isi aduan yang menyatakan bahwa sekolah telah melanggar Undang-Undang Anti-Diskriminasi (DDA). Aduan ini kemudian ditindak lanjutkan berujung pada pemberian sanksi terhadap sekolah tersebut.

Dalam proses pengembangannya, Undang-Undang Anti-Diskriminasi (DDA) menjadi wilayah otoritas utama dari *Human Rights and Equal Opportunity Commission* (HREQ). Lebih lanjut, komisi ini memiliki tugas untuk memastikan diimplementasikannya undang-undang tersebut sebagaimana mestinya dan menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait tindakan diskriminasi terutama terhadap para penyandang penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Undang-Undang Anti-Diskriminasi (DDA) menjadialah satu landasan hukum utama yang dimiliki oleh Pemerintah Australia terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang ini menjadi titik balik perkembangan penanganan masalah terkait disabilitas di Australia. Dengan berkembangnya isu dan landasan hukum terkait tindakan anti-diskriminasi, diharapkan dapat menjadi sumber acuan dan menjadi metode preventif untuk memberi perlindungan bagi semua orang di Australia terhadap diskriminasi tingkat disabilitas yang dimiliki. DDA menjadi *framework* utama yang digunakan oleh Pemerintah Australia dalam merumuskan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Dalam struktur Federal Australia, Parlemen Federal tidak memiliki otoritas konstitusional khusus untuk membuat undang-undang tentang hak asasi, disabilitas atau diskriminasi. Akan tetapi, parlemen memiliki otoritas dalam menangani urusan eksternal seperti pembuatan undang-undang untuk mengimplementasikan perjanjian (deklarasi dan konvensi) serta masalah-masalah yang menjadi perhatian internasional. Kemudian, keadaan ini telah memposisikan Parlemen Australia untuk memiliki otoritas penuh dalam meloloskan undang-undang atau peraturan internasional terkait isu hak asasi dan disabilitas.

Lebih lanjut, menurut David Mason selaku *Director Disability Rights policy 1992 – 2002 Human Rights and Equal Opportunity Commission* menjelaskan bahwa

tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan mengadopsi berbagai peraturan dan perjanjian merupakan bentuk tindakan yang mulia (Mason, 2002). Tindakan ini sudah sedikit banyak membuktikan bahwa Australia telah menunjukkan niat dan usaha yang terbaik, untuk menegakkan kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan bagi disabilitas. Akan tetapi, spesifikasi dalam langkah-langkah implementasi harus menjadi perhatian utama. Karena hal ini dibutuhkan untuk memastikan terpeenuhnya hak asasi manusia yang setara, terutama dalam praktek bagi para penyandang disabilitas. Pendapat ini menjadi sumber masukan bagi Pemerintah Australia untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan serta penanganan disabilitas.

Undang-Undang Anti-Diskriminasi menjadi *framework* utama yang dijadikan landasan dalam proses pelayanan dan penanganan disabilitas. Lebih lanjut, sesuai dengan Hukum Konstitusi Federal, Pemerintah Australia memiliki kewajiban untuk memberikan dana operasional terhadap pemerintah negara bagian termasuk didalamnya terkait pendanaan disabilitas. Sebelumnya, Pemerintah negara bagian dan lokal memberikan proposal program dan rencana anggaran terkait penanganan disabilitas ke pemerintah nasional. Kemudian, dana tersebut dikelola oleh pemerintah negara bagian untuk dialirkan ke pemerintah lokal dan masyarakat penyandang disabilitas.

Dengan adanya undang-undang diskriminasi terkait disabilitas telah membangkitkan inovasi inisiatif hukum dan kebijakan terkait penanganan serta pelayanan hak penyandang disabilitas di Australia diantaranya ;

### ***1. Disability Services Act***

*Disability Services Act* merupakan suatu undang-undang yang berisi mengenai tuntunan (*guide*) dalam pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas. Undang-undang ini membahas secara spesifik mengenai tata cara operasional terkait disabilitas. Undang-Undang Pelayanan Disabilitas membahas mengenai aspek-aspek disabilitas yang harus dilayani oleh pemerintah pusat, negara bagian dan teritori. Lebih lanjut, Undang-Undang Pelayanan Disabilitas juga membahas mengenai diperlukannya kontribusi antara pemerintah negara bagian dan teritori dengan organisasi disabilitas disekitar untuk bersama memberikan pelayanan terbaik terkait disabilitas.

Dalam pembahasannya juga, Undang-Undang Pelayanan Disabilitas (DSA) menginisiasi untuk terbentuknya Komisi Layanan Disabilitas (*Disability Services Commission*) yang dibawah Pemerintah Federal, untuk mengawasi proses pelayanan disabilitas agar berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun tugas dari Komisi Layanan Disabilitas ialah membuat perencanaan dan kebijakan, legislasi, badan penasihat, standar-standar bangunan disabilitas, dukungan advokasi, informasi dan rujukan terkait keluhan mengenai proses pelayanan disabilitas.

Undang-undang pelayanan disabilitas menjadi *framework* utama Pemerintah Australia (*commonwealth*) dalam mengarahkan negara bagian dan teritori untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Meskipun demikian, pemerintah negara bagian dan teritori memiliki kekuasaan untuk menginterpretasikan undang-undang tersebut kedalam legislasi hukum pemerintahan negara bagian dan teritori mereka. Pada tahun 1993, *Western Australia* menjadi negara bagian yang pertama mengadopsi undang-undang pelayanan disabilitas. Lebih lanjut, untuk memaksimalkan landasan hukum terkait pelayanan disabilitas, Pemerintah melakukan dua kali amandemen Undang-Undang Pelayanan Disabilitas pada tahun 1999 dan 2004. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait pembiayaan kebutuhan disabilitas yaitu *State Supply Commission Policy* “*buying wisely to ensure access for people with disabilities*” dan terkait ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pemerintah negara bagian juga mengeluarkan kebijakan *State Government Access Guidelines* (Goverment, 2004).

Lebih lanjut, dalam ranah implementasi kebijakan tingkat pemerintah negara bagian dan teritori mayoritas dari mereka pada saat itu mengadopsi Undang-Undang Pelayanan Disabilitas dan memasukannya kedalam dasar hukum wilayah mereka. Pada tahap ini terjadi perkembangan signifikan dalam proses implementasi undang-undang pelayanan disabilitas. Dimana pemerintah negara bagian dan teritori mulai secara resmi bekerjasama dengan organisasi yang bergerak dibidang pelayanan disabilitas serta memberikan dana operasional kepada mereka. Dengan fungsi utama sebagai pihak pelengkap yang membantu realisasi kebijakan negara.

Dengan hadirnya organisasi dan lembaga yang bergerak dalam pelayanan disabilitas telah sedikit banyak membantu proses pemenuhan hak

serta kebutuhan penyandang disabilitas Australia. Organisasi dan lembaga disabilitas menjadi sektor ketiga setelah pemerintah pusat, negara bagian dan teritori untuk membantu disabilitas. Lebih lanjut, *Queensland* dan *Victoria* menjadi negara bagian dengan tingkat partisipasi organisasi dan lembaga disabilitas dalam bentuk pelayanan disabilitas yang signifikan (Pamela Spall, 2004).

Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi dan lembaga disabilitas memiliki peran yang signifikan dalam membantu pemerintah untuk melayani kebutuhan disabilitas. Akan tetapi, dalam realisasinya masih dialami kendala terkait masih timbulnya rasa ketidakpercayaan dan kurang koordinasi yang komprehensif antara pemerintah nasional, negara bagian dan teritori serta penyandang disabilitas menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Berikut ini terdapat beberapa kebijakan terkait disabilitas yang dikeluarkan dan diperbaharui oleh Pemerintah Australia sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Disabilitas yaitu ;

*a. Disability Support Pension*

*Disability Support Pension* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia (Federal) untuk membantupara penyandang agar dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Lebih lanjut, DSP adalah bentuk pendanaan disabilitas yang diberikan Departemen Layanan Manusia (*Department of Human Services*) yang menyediakandukungan keuangan kepada orang-orang yang memiliki kondisi fisik, intelektual, atau psikiatri yang menghentikan mereka dari aktifitas pekerjaan.

Secara historis, dukungan pendanaan bagi disabilitas pertama kali dikenal dengan *Invalid and Old-Age Pensions Acts* yang dan berada dalam wilayah otoritas pemerintah pusat. Dan pertama kali dikenalkan pada tahun 1908, *New South Wales* menjadi negara bagian yang pertama kali diterapkannya kebijakan pendanaan ini (Mays, 2015). Kebijakan *Invalid and Old-Age Pensions* atau yang saat ini dikenal dengan nama *Disability Support Pension* mendapatkan respon yang baik dari penyandang disabilitas karena membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan. Kebijakan ini terus

mengalami perubahan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi disabilitas. Australia menjadi salah satu negara pertama yang memperkenalkan sistem dukungan pendapatan yang didanai Pemerintah Australia untuk perlindungan sosial.

DSP dirancang untuk memberi sarana pendukung yang memadai bagi penyandang disabilitas. Dengan kondisi yang menjadi pertimbangan yaitu individu yang tidak dapat selama 15 jam per minggu, memiliki gaji minimum yang relevan, terlepas dari program dukungan lainnya, dan memiliki gangguan fisik, intelektual atau kejiwaan permanen. Untuk mengakses bantuan ini, penyandang disabilitas harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat mengetahui tingkat disabilitas dan nominal bantuan dana yang didapatkan.

Sesuai dengan peraturan terbaru DSP tahun 2009, adapun persyaratan yang harus dipenuhi ialah seseorang harus berusia 16 tahun atau lebih dan berada di bawah usia pensiun pada saat klaim (63,5 tahun untuk wanita dan 65 tahun untuk pria). Kemudian, penerima *Disability Support Pension* menerima dana secara signifikan lebih banyak, pendanaan yang diterima ialah \$ 562.10 per-dua minggu untuk penyandang disabilitas yang berstatus lajang dan \$ 469,50 untuk setiap anggota pasangan (Services D. o., 2009).

#### *b. Disability Standart*

*Disability standart* merupakan salah satu peraturan atau standar-standar yang dihasilkan di bawah DDA. Lebih lanjut, serangkaian standar disabilitas dan pedoman yang memberikan lebih banyak rincian tentang hak dan tanggung jawab tentang akses dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. *Disability Standart* adalah peraturan yang mengikat secara hukum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di bawah DDA.

*Disability Standart and Guidelines* dibuat dalam berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, pendidikan, layanan transportasi umum, akses ke tempat, akomodasi dan administrasi hukum. Dalam bidang pendidikan, terdapat peraturan *Disability Standart for Education 2005* sebagai standar yang digunakan

dalam memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dan calon siswa penyandang disabilitas hak atas pendidikan dan kesempatan pelatihan dengan dasar yang sama dengan siswa tanpa disabilitas. Termasuk didalamnya hak untuk akses sebanding terhadap layanan dan fasilitas, penyesuaian kurikulum serta hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan, tanpa hambatan dan diskriminasi. Kemudian, terdapat standar terkait layanan transportasi umum bagi penyandang disabilitas yaitu *Disability Standards for Accessible Public Transport*. Dalam DSAPT dijelaskan mengenai standar yang dapat digunakan terkait pengadaan dan fasilitas pendukung terkait transportasi publik seperti peyediaan halte bis yang dapat diakses semua pihak dan terbuat dari bahan yang kokoh, penyediaan pintu transportasi umum yang lebih besar sehingga penumpang yang menggunakan kursi roda dapat keluar dan masuk dengan mudah. Penyediaan *special sign* didalam bis untuk pengguna kursi roda, jarak antar trotoar dengan pintu transportasi sedekat mungkin dan menyediakan landai (*ramps* atau penghubung antara trotoar dengan pintu bis) dan sebagainya.

## **2. Commonwealth-State Territory Disability Agreement**

Inisiatif terkait proses penanganan dan pelayanan disabilitas berkembang pesat diakhir tahun 90an, berbagai ide dan gagasan terbaik terkait penanganan disabilitas diajukan untuk segera di implementasikan. *Commonwealth-State Territory Disability Agreement* menjadi salah satu inisiatif yang banyak menarik perhatian, dimana Pemerintah Federal, negara bagian dan teritori bersama membuat suatu perjanjian untuk berkerjasama dalam memastikan keberlangsungan pelayanan terhadap disabilitas. Dibawah perjanjian ini, Pemerintah Australia secara umum memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pengaturan kebijakan dan manajemen bantuan pekerjaan khusus. Lebih lanjut, pemerintah negara bagian dan teritori memiliki tanggung jawab yang sama untuk dukungan akomodasi, dukungan masyarakat, akses komunitas dan dukungan untuk advokasi untuk penyandang disabilitas. Melalui perjanjian tersebut, Pemerintah Federal negara bagian dan teritori

berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Untuk kemudian mereka dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang dihargai dan berpartisipasi.

Pada tahun 1991-1996, CSTDA pertama kali disetujui oleh Pemerintah Australia secara umum. CSTDA merupakan perjanjian multilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Federal, negara bagian dan teritori untuk berkomitmen dan bekerjasama dalam penanganan disabilitas (Services D. o., 2010). Dalam perjanjian ini semua pemerintah pusat, negara bagian dan teritori dengan tanggung jawab untuk melaksanakan prioritas kebijakan terkait disabilitas. Seperti memperkuat akses ke layanan umum bagi penyandang disabilitas, memperkuat hubungan pemerintah, memperkuat individu dan keluarga serta meningkatkan strategi jangka panjang dan meningkatkan akuntabilitas kualitas layanan spesialis disabilitas.

Secara khusus, Pemerintah Australia bertanggung jawab untuk mengelola layanan ketenagakerjaan, dan negara bagian serta teritori bertanggung jawab untuk mengelola akomodasi, dukungan kemasyarakatan, akses masyarakat secara umum, layanan tangguhan (*funding*), dan dukungan lainnya. Semua lapisan Pemerintah Australia diharapkan untuk menempatkan perhatian khusus terkait pelaksanaan pelayanan kebijakan pelayanan disabilitas dan memastikan bahwa informasi ini harus dilaporkan kembali kepada masyarakat secara transparan.

Perjanjian CSTDA pertama telah menjadi peristiwa penting bagi penyandang disabilitas dan sektor disabilitas. Untuk pertama kalinya masalah penyediaan layanan disabilitas dibingkai dalam konteks nasional dengan penekanan khusus pada standar umum penyediaan layanan dan data kinerja yang sebanding. Akan tetapi, terdapat kekurangan dalam perkembangan CSTDA pertama. Menurut data dari *Parliament of Australia* yaitu tidak adanya ketentuan praktis dalam menetapkan potensi manajemen sumberdaya antar pemerintah dan indikasi kurangnya koordinasi antar pemerintah masih sangat terlihat. Keadaan ini kemudian menjadikan CSTDA pertama tidak berjalan secara efektif (Australia P. o., 2004).

Lebih lanjut, pada tahun 1998-2001 perjanjian kedua kerjasama antar semua tingkatan Pemerintah Australia (CSTDA) mengalami pembaharuan. Pada dasarnya prinsip yang digunakan masih tetap sama yakni meningkatkan

kualitas pelayanan terhadap disabilitas. Pada tahap ini, perjanjian bilateral antar pemerintah negara bagian dan teritori mulai dikenalkan untuk melengkapi perjanjian multilateral sebelumnya. Lebih lanjut, penyediaan sarana bagi pemerintah negara bagian dan teritori untuk bekerja dalam kemitraan dengan masing-masing pemerintah untuk menangani isu-isu disabilitas lokal dan bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Dalam proses realisasinya perjanjian CSTDA kedua mengalami kendala, hal ini disebabkan perjanjian tidak mengandung arah kebijakan strategis yang luas yang dapat dihubungkan dengan program lain. Ketidakjelasan tentang pengaturan pendanaan dan bidang tanggung jawab, yang menghambat keberlanjutan pengembangan dan penyediaan layanan. Menurut laporan *Government Services 2002* dalam *The Steering Committee for the Review of Government Service Provision (SCRGS)*, menyatakan bahwa kesenjangan dalam pelaporan kualitas layanan dan ketersediaan data terkait pelayanan disabilitas dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas kinerja dalam proses penerapan kebijakan CSTDA selanjutnya. Kemudian, permasalahan terkait kurangnya koordinasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus kembali diselesaikan (Commission, 2002).

Selanjutnya, pada tahun 2002-2008 perjanjian ketiga terkait kerjasama antar Pemerintah Australia. Tuntutan untuk terjadinya pembaharuan dan kerjasama yang komprehensif terkait pelayanan serta pemenuhan hak disabilitas terus disuarakan. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Federal, negara bagian, teritori dan penyandang disabilitas itu sendiri sangat dibutuhkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. *Australian Capital Territory* dan *Western Australia* menjadi negara bagian serta teritori yang berperan penting sebagai inisiator reformasi terkait layanan disabilitas dan bekerjasama dengan pemerintah pusat. Inisiasi terkait pembaharuan terkait layanan dan pemenuhan hak disabilitas telah digunakan oleh ACT melalui *the work of Future Directions: A Framework for the ACT 2004-2008 (extended to 2009)* dan diangkat menjadi bahan pembahasan terkait layanan disabilitas di tingkat Federal Australia (Government, 2009). Lebih lanjut, terdapat beberapa inisiasi dan reformasi perjanjian yang disampaikan seperti *National Disability Agreement (NDA)*, *National Disability Strategy (NDS)*, *National Disability Insurance Scheme (NDIS)* dan sebagainya. Pada tahun 2009, *National*

*Disability Agreement* diresmikan untuk menjadi *framework* nasional baru untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap penyandang disabilitas yang lebih koordinatif dan komprehensif.